

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kemiskinan dan pengangguran dewasa ini bukan saja menjadi persoalan bangsa Indonesia. Kemiskinan telah menjadi isu global dimana setiap negara merasa berkepentingan untuk membahas kemiskinan, terlepas apakah itu negara berkembang maupun sedang berkembang. Tokoh yang dianggap bapak ilmu ekonomi modern, Adam Smith pada saat meluncurkan buku *An Inquiry into The Wealth of Nations* menyebutkan bahwa, “Tidak ada masyarakat yang benar-benar bisa berkembang dan senang apabila kebanyakan diantaranya miskin dan tidak bahagia”.

Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.

Pemerintah telah berupaya menyalurkan berbagai program untuk memberdayakan masyarakat miskin di Indonesia. Salah satu cara dalam pengentasan kemiskinan adalah dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan, sehingga pemerintah mengeluarkan beberapa program pemberdayaan masyarakat antara lain: PPK, P2KP, PEMP dan KUBE. Program pembangunan ekonomi ternyata tidak efektif, bantuan yang dikucurkan pemerintah tidak menyentuh

kelompok miskin. Program-program pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan pelaksanaannya kurang efektif sehingga pemerintah mengeluarkan program baru yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).

Tahun 2007 Pemerintah Indonesia menurut UU RI No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Masyarakat dalam konteks pemberdayaan berfungsi bukan hanya menjadi objek tetapi juga menjadi subjek. Mereka adalah yang secara bersama-sama akan menentukan ke arah mana mereka akan berkembang. Konsep perubahan masyarakat sekarang mengalami pergeseran, dari yang tadinya masyarakat sebagai objek menjadi masyarakat sebagai subjek. Pendekatan yang dilakukan kemudian dikembangkan dengan menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan. Pendekatan tersebut lebih bersifat memberdayakan masyarakat, atau dikenal dengan model "Pemberdayaan Masyarakat" (*Community Development*), dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan, pemerintah menggunakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sebagai salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat di daerah perdesaan. Kegiatan yang dapat

didanai melalui program ini, diutamakan pada kegiatan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin, berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan, dapat dikerjakan oleh masyarakat, didukung oleh sumber daya yang ada serta memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan, serta program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan oleh pemerintah agar angka kemiskinan dan pengangguran di tingkat perdesaan menurun. PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program pembangunan yang dikelola Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kurun waktu perjalanan program ini, terjadi dinamika dan perkembangan yang pesat, khususnya terkait lokasi dan alokasi program. Saat ini sebagian besar lokasi kecamatan di Indonesia ditetapkan sebagai lokasi PNPM Mandiri Perdesaan.¹

Salah satu jenis kegiatan PNPM-MPd ini adalah penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan atau yang sering disebut dengan SPP. Dalam salah satu tujuan khususnya, disebutkan bahwa PNPM Mandiri bertujuan untuk meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan. Kegiatan SPP merupakan salah satu jenis kegiatan yang secara nyata menunjukkan adanya keseriusan dari PNPM Mandiri untuk memprioritas pemberdayaan perempuan. Secara umum

¹Risca Arih Purnama dan Algifari, *Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Tatah Makmur*, (Pemangkih Baru, 2010),h. 2.

kegiatan simpan pinjam perempuan merupakan suatu kegiatan dalam bentuk simpan pinjam, yang semua anggotanya adalah perempuan.

Berdasarkan observasi dan wawancara pendahuluan, kegiatan SPP ini telah berlangsung selama lima tahun di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar, PNPM-MPd mempunyai beberapa program tetapi setelah tutup buku hanya Program Simpan Pinjam Perempuan yang terus berkelanjutan dan diketahui belum ada evaluasi yang bersifat ilmiah dari Program PNPM Mandiri Perdesaan ini, khususnya Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar, padahal sebuah evaluasi itu sangat penting dilakukan terhadap suatu program, terlebih program tersebut merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat miskin, khususnya perempuan. Di tempat tersebut juga dapat dikatakan masih banyak rumah tangga yang tergolong tidak mampu. Dengan adanya sebuah evaluasi akan dapat diketahui apakah program tersebut sudah dapat memenuhi tujuannya atau belum. Berangkat dari fenomena ini, penulis merasa perlu melakukan penelitian untuk mengkaji bagaimana efektivitas program SPP PNPM-MPd terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang menjadi anggota dan sebagaimana yang ada pada tujuan program, khususnya Program Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar, sehingga penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Pinjaman Dana Bergulir PNPM-MPd terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah program SPP di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar telah berjalan efektif?
2. Apakah program SPP berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan anggota kelompok program SPP di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas program SPP di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar.
2. Untuk mengetahui pengaruh program SPP terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota kelompok program SPP di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penelitian ini, maka penulis perlu memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna).²Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan, efektivitas disebut efektif apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Sesuai dengan penelitian maka yang diinginkan di sini adalah melihat bagaimana pelaksanaan program SPP PNPM-MPd apakah telah efektif atau tidak.
2. PNPM Mandiri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. PNPM Mandiri difokuskan pada program penanggulangan kemiskinan yang berbasis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri merupakan integrasi dan perluasan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis masyarakat yang sudah berjalan. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan dan juga program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan oleh pemerintah agar angka kemiskinan dan pengangguran di tingkat perdesaan menurun.³
3. Pinjaman Dana Bergulir atau biasa dikenal dengan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dikelola dan disalurkan sebagai dana bergulir di tingkat kecamatan yang harus dilestarikan dan dikembangkan. Pinjaman dana bergulir diberikan kepada kelompok simpan pinjam, bukan kepada individu.⁴

²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 250.

³Risca Arih Purnama dan Algifari, *Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Tatah Makmur*, (Pemangkih Baru, 2010),h. 3.

4. Kesejahteraan menurut Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009, kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi bagi para pelaku ekonomi atau masyarakat, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi anggota kelompok SPP PNPM-MPd di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar. Kesejahteraan masyarakat yang menurut Biro Pusat Statistik Indonesia dapat diukur dengan beberapa indikator sebagai berikut:
- a. Tingkat pendapatan keluarga
 - b. Komposisi pengeluaran rumah tangga
 - c. Tingkat pendidikan keluarga
 - d. Tingkat kesehatan keluarga
 - e. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga⁵

E. Signifikansi Penelitian

Dari hasil penulisan yang dilakukan ini, diharapkan penulisan ini bermanfaat untuk:

1. Sebagai informasi dan referensi bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
2. Penulis, sebagai media aplikasi teori dan penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan, sekaligus menambah wawasan dan pengetahuan,

⁴*Ibid*, h. 9.

⁵Adi Nugroho, http://www.eprints.undip.ac.id/38829/3/BAB_II.pdf, diakses tgl 26-03-2015, 09:55 am.

khususnya dalam memahami penerapan program pemerintah kepada masyarakat desa.

3. Pemerintah, memberikan informasi bagi pemerintah tentang pelaksanaan PNPM-Mandiri di lapangan dan menjadi evaluasi serta bahan kajian bagi pemerintah dalam pelaksanaan program-program selanjutnya.
4. Bagi masyarakat, sebagai informasi mengenai pelaksanaan PNPM-Mandiri di wilayah Perdesaan. Melalui informasi ini, diharapkan bagi masyarakat yang belum mengikuti program PNPM-Mandiri tersebut untuk lebih aktif dalam mengikuti program-program yang akan dilaksanakan selanjutnya.
5. Sebagai sumbangan pemikiran dan memperkaya khazanah kepustakaan bagi IAIN Antasari Banjarmasin.

F. Hipotesis Penelitian

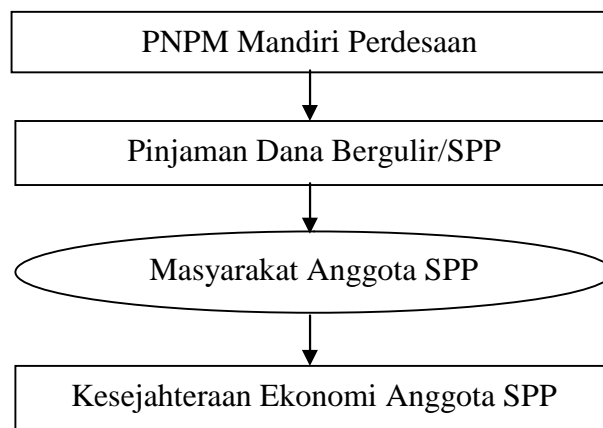
Hipotesis merupakan dugaan sementara yang kemungkinan benar atau kemungkinan juga salah. Hipotesis tersebut akan ditolak jika ternyata salah, dan akan diterima jika fakta-fakta membenarkan.

Oleh karena itu, penulis akan mengajukan hipotesis berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Program SPP di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar tergolong efektif.
2. Program SPP berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota kelompok program SPP di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah seluruh kegiatan penelitian, sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penyelesaian dalam satu kesatuan yang utuh. Kerangka pemikiran digunakan untuk memudahkan arah di dalam penelitian. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini secara sistematis dapat digambarkan sebagai berikut:



Program yang penulis teliti yaitu PNPMP-MPd yang salah satu programnya adalah pinjaman dana bergulir atau sering disebut dengan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) yang disalurkan kepada anggota kelompok program tersebut untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota kelompok program SPP.

H. Kajian Pustaka

Hasil dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini akan dibahas secara singkat untuk dapat mengetahui dan membandingkan hasil dari perbedaan dengan penelitian ini, yaitu hasil penelitian oleh:

Agus Budiyo (06210005), IKIP Semarang tahun penelitian 2010, dengan judul skripsi “*Dampak Pelaksanaan Program PNPM Mandiri terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Desa Darupono Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program PNPM Mandiri memberikan dampak bertambahnya penghasilan keluarga, adanya peningkatan daya beli, adanya peningkatan pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi, dan adanya peningkatan konsumsi keluarga.

Agnes Rossa Fitalia (1201406032), Universitas Negeri Semarang tahun penelitian 2010, dengan judul skripsi “*Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Bawang Kabupaten Batang*”. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa realisasi PNPM-MPd Kecamatan Bawang Kabupaten Batang sebesar 79% termasuk dalam kategori baik. Pengendalian PNPM-MPd Kecamatan Bawang Kabupaten Batang sebesar 78% termasuk dalam kategori baik. Dari analisis regresi sederhana diperoleh persamaan regresi $Y = 50,477 + 0,136 X$. Besarnya koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,036 sehingga realisasi PNPM Mandiri Perdesaan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Bawang Kabupaten Batang hanya sebesar 36%.

Sulis Prasetyo tahun penelitian 2009, dengan judul skripsi “*Analisis Dampak Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Program*

Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) di Kabupaten Karanganyar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan peserta program kerja mandiri/program simpan pinjam kelompok perempuan (SPKP) meningkat sebesar 29,75% untuk rumah tangga dan 33,86% untuk individu penerima program. Peningkatan pendapatan pemanfaat yang lebih tinggi menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan pemanfaat mempunyai kontribusi yang besar dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga. Jumlah peserta program kerja mandiri yang miskin menurun sebesar 14,28%, hal ini disebabkan keberhasilan dalam usaha mereka (*net income* naik) yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Efisiensi penyaluran program kerja mandiri sebesar 130,03%, angka ini menunjukkan tingginya tambahan pendapatan usaha bersih peserta program antara sebelum mengikuti program dan setelah mengikuti program.

Rully Hikmahtul Maulidiah, Universitas Brawijaya Malang tahun penelitian 2011, dengan judul skripsi "*Efektivitas Pinjaman Dana Bergulir PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Perkotaan terhadap Masyarakat Kurang Mampu (Studi Kasus Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)*". Melalui analisis data yang dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang telah efektif. Hal ini terlihat dari 4 indikator dalam melihat efektivitas suatu program, yaitu yang terdiri dari : tingkat kualitas, di mana yaitu pelayanan yang baik diberikan oleh pihak BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) kepada KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) atau penerima

manfaat, seperti bimbingan yang dilakukan oleh pihak BKM dalam hal pembuatan proposal pengajuan usaha. Tingkat kuantitas, dilihat modal yang diberikan dan jenis usaha yang digunakan. Modal tersebut harus merata pada setiap anggota KSM dan modal tersebut harus digunakan untuk mengembangkan atau membuka usaha. Dari dampak dapat dilihat dari adanya peningkatan pendapatan yang diterima oleh responden setelah menerima pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan. Dari tingkat waktu pengembalian pinjaman dana bergulir terlihat bahwa tidak lebih dari 12 bulan.

Baharuddin (E 411 07 051), Universitas Hasanuddin Makassar tahun penelitian 2012, dengan judul skripsi "*Dampak Sosial Ekonomi Proyek Pemberdayaan PNPM Mandiri Perdesaan dalam Kehidupan Masyarakat di Kelurahan Je'nebatu Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa*", program pemerintah terkait dengan PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Je'nebatu Kabupaten Gowa cukup berdampak positif terhadap sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Je'nebatu, dalam bidang ekonomi, PNPM Mandiri Perdesaan memberikan bantuan modal simpan pinjam yang mana berdampak baik bagi masyarakat, dalam hal ini masyarakat diberikan modal untuk membuka usaha, dalam sektor pendidikan, PNPM Mandiri Perdesaan memberikan bantuan terkait dengan pendidikan wajib belajar 9 tahun dan pemberian beasiswa pendidikan bagi kelompok RTM, selain itu dalam bidang kesehatan, PNPM Mandiri Perdesaan memberikan bantuan makanan bergizi dan pengobatan penyakit menahun. PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Je'nebatu pada dasarnya mengalami hambatan dalam pelaksanaannya termasuk dalam pendampingan, yaitu kurangnya waktu

untuk berpartisipasi dan sosialisasi fasilitator yang kurang terhadap masyarakat, selain itu dalam tahap pelaksanaan, kesibukan masyarakat cukup tinggi dan adanya penuntutan gaji dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan.

Dewi Ningnurati, Universitas Negeri Malang tahun penelitian 2011, dengan judul skripsi "*Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak PNPM-MPd yaitu meningkatnya pengembangan prasarana sosial dasar pendidikan, meningkatnya prasarana sosial dasar pada pembangunan talut dan drainase, meningkatnya prasarana ekonomi pada pembangunan pasar dan meningkatnya dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP), penambahan perluasan lapangan pekerjaan bagi rumah tangga miskin di Kecamatan Wonosari Kabupaten. Meningkatnya partisipasi keswadayaan masyarakat berupa partisipasi keswadayaan uang dan tenaga. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat rumah tangga miskin di Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang.

Dengan demikian terdapat pokok permasalahan yang berbeda antara penelitian terdahulu di atas dengan yang akan penulis teliti. Namun ada pokok permasalahan yang hampir sama dengan yang akan penulis teliti tetapi masih ada perbedaan mengenai objeknya dan dengan lokasi yang berbeda.

I. Sistematika penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut yaitu:

Bab I pendahuluan, merupakan bab yang akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menguraikan alasan untuk memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarkan dirumuskan dalam rumusan masalah. Setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Signifikansi penelitian merupakan manfaat atau kegunaan hasil penelitian. Hipotesis penelitian digunakan untuk menentukan dugaan sementara. Kerangka pemikiran adalah seluruh kegiatan penelitian, sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penyelesaian dalam satu kesatuan yang utuh. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II landasan teori, merupakan acuan untuk menganalisis data yang diperoleh, dalam bab ini berisi tentang teori pengukuran efektivitas, teori kemiskinan dan pengangguran, teori konsep kesejahteraan ekonomi dalam konteks ekonomi Islam, teori pembangunan ekonomi, teori pemberdayaan masyarakat melalui PNPM-MPd.

Bab III metode penelitian, dalam bab ini akan dibahas mengenai jenis, sifat dan lokasi penelitian, desain penelitian, objek dan subjek penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, desain pengukuran, teknik analisis data, variabel penelitian, dan prosedur penelitian.

Bab IV laporan hasil penelitian dan pembahasan, bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan hasil analisis data.

Bab V penutup, dalam bab ini peneliti memberikan simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengukuran Efektivitas

Secara sederhana efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna).⁶ Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Adapun pengertian efektivitas menurut para ahli di antaranya sebagai berikut:

Sondang P. Siagian memberikan definisi bahwa “efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan”.⁷ Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Sementara itu Abdurrahmat, “efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana

⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 250.

⁷Yunita Ardha, yunitaardha.blogspot.com/2012/04/kumpulan-teori-efektivitas.html, diakses tgl 26-03-2015 09:38 am.

dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya”.⁸

Efektivitas memiliki tiga tingkatan sebagaimana yang didasarkan oleh David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely antara lain:

1. Efektivitas Individu

Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.

2. Efektivitas Kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya.

3. Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya. Jadi efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai.⁹

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai, di mana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Menurut Cambel J.P, pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

1. Keberhasilan program

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Pencapaian tujuan menyeluruh

Mengukur efektivitas bukanlah suatu hal yang sederhana karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan maka hal itu dikatakan tidak efektif. Kemampuan memecahkan masalah, keefektifan tindakan dapat diukur dari kemampuannya dalam memecahkan persoalan dan hal ini dapat dilihat dari berbagai permasalahan yang dihadapi sebelum dan sesudah tindakan tersebut dilaksanakan dan seberapa besar kemampuan dalam mengatasi persoalan.¹⁰

B. Kemiskinan dan Pengangguran

1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global, sebagian orang memahami

¹⁰Emir Ramadhana Putra, www.academia.edu/9925922/teori_efektivitas_organisasi, diakses tgl 26-03-2015 09:47 am.

istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.¹¹ Ada berbagai pendapat yang dikemukakan tentang pengertian kemiskinan:

Mudrajad mendefinisikan kemiskinan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal standar hidup tertentu. Menurut Suparlan kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, kehidupan normal, dan rasa harga diri dari mereka tergolong sebagai orang miskin.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang apa adanya.

M.P. Todaro mengemukakan dua anggapan dasar yang kiranya cukup relevan dengan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli mengenai kemiskinan, yaitu:

- a. Kemiskinan identik dengan penduduk miskin yang tinggal di daerah pedesaan, dengan mata pencaharian pokok dibidang pertanian dan kegiatan lain yang erat hubungannya dengan sektor ekonomi tradisional.

¹¹Adhi, adhiprawiraa.blogspot.com/2014/05/pengertian-kemiskinan.html, diakses tgl 26-03-2015 10:15 am.

- b. Kaum wanita dan anak-anak merupakan kaum yang paling menderita, yang disebabkan oleh rendahnya kapasitas mereka dalam mencetak pendapatan sendiri, terbatasnya kesempatan menikmati pendidikan dan pekerjaan yang layak di sektor formal.

Dari anggapan dasar tersebut dapat diambil konsep-konsep dasar yang perlu dibangun yaitu:

- a. Pembangunan hendaknya lebih diarahkan pada daerah-daerah pedesaan yang identik dengan penduduk miskin dengan meningkatkan potensi yang dimiliki daerah pedesaan yang bersangkutan.
- b. Kaum wanita dan anak-anak harus diberi kesempatan berusaha secara mandiri agar dapat berperan serta secara aktif dalam proses pembangunan.

Indikator utama kemiskinan dapat dilihat dari kurangnya pangan, sandang, dan perumahan yang tidak layak, terbatasnya kepemilikan tanah dan alat produksi, kurangnya kemampuan membaca dan menulis, kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup, kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi, akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas, dalam studi tentang masalah kemiskinan, ada dua perbedaan penting yang harus dikemukakan. Pertama, kemiskinan kultural dan kedua, kemiskinan struktural. Kedua model tersebut tidak bisa diberi perspektif pandang yang sama. Demikian pula dalam cara menghadapinya. Cara yang dipergunakan untuk mengentaskan kemiskinan yang diakibatkan oleh struktur yang timpang tentu saja berbeda dengan

kemiskinan akibat karakter budaya dan etos kerja yang rendah. Masing-masing model kemiskinan memiliki pendekatan yang berbeda satu sama lain.¹²

Kriteria kemiskinan di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik ada 14 kriteria, antara lain:

- a. Luas bangunan tempat tinggal kurang 8 m² per orang
- b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah / bambu / kayu murahan
- c. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu / rumbia / kayu berkualitas rendah / tembok tanpa diplester
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
- f. Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tidak terlindung / sungai / air hujan
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar / arang / minyak tanah
- h. Hanya mengonsumsi daging / susu / ayam satu kali dalam seminggu
- i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam satu tahun
- j. Hanya sanggup makan sebanyak satu / dua kali dalam sehari
- k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poliklinik

¹²Saiful Arif, *Menolak Pembangunanisme*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 289.

- l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan
- m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah atau tidak tamat SD / hanya SD
- n. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000, seperti sepeda motor (kredit atau nonkredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Ciri-ciri kemiskinan penduduk antara lain adalah:

- a. Sebagian besar kelompok penduduk yang miskin tinggal di daerah pedesaan. Mereka pada umumnya bekerja sebagai buruh tani karena tidak memiliki tanah, namun tidak luas sehingga tidak cukup untuk membiayai hidup sekeluarga dengan layak.
- b. Banyak di antara mereka yang menganggur atau setengah menganggur. Pengertian setengah menganggur yaitu jika waktu kerjanya rata-rata setiap hari kurang dari 3 jam.
- c. Jika mereka mempunyai usaha sendiri, biasanya alat yang digunakan itu sewaan dari orang lain. Sifat usaha mereka kecil-kecilan dan terbatas karena kekurangan modal.
- d. Kebanyakan mereka tidak berpendidikan dan jika berpendidikan, tingkat pendidikannya rendah.¹³

¹³Ibnu Syamsi, *Pokok-pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), h. 6.

Sebagaimana kita ketahui bahwa negara dapat dibedakan ke dalam negara maju (*develop country*) dan negara berkembang (*developing country*). Umumnya pada negara yang maju jumlah penduduknya mengalami pertambahan yang relatif kecil, sedangkan pertambahan penduduk di negara-negara berkembang relatif besar atau cepat. Dengan demikian sudah tentu, jika pada negara berkembang sebagian besar masih berada dalam keadaan miskin. Penduduk yang miskin sebagian besar berada di desa-desa, sehingga dapat dikatakan bahwa pusat kemiskinan berada di desa. Konsep pembangunan pada pusat kemiskinan, berarti bahwa pembangunan harus dimulai dari desa. Pembangunan dimulai dari bawah dengan *bottom up strategy*. Pembangunan dari bawah dalam konsep ini mengandung pengertian pembangunan lebih ditekankan atas dasar kemampuan sendiri, tidak terlalu menggantungkan pada pihak lain. Kalau pusat kemiskinan (desa) telah dibasmi kemiskinannya, maka akan terjadi keseimbangan dengan keadaan di kota. Dengan demikian, maka akan dapat diadakan pembangunan yang sifatnya serempak bersama-sama untuk waktu selanjutnya.¹⁴

Pembangunan dari bawah mempunyai tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat di daerah itu. Pendapatan masyarakat harus dapat ditingkatkan sehingga pemenuhan kebutuhan pokok dapat terlaksana. Pendapatan masyarakat yang perlu ditingkatkan di sini adalah masyarakat yang termasuk miskin. Mereka yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan hidup

¹⁴Ibnu Syamsi, *Pokok-pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), h. 15.

yang paling pokok adalah yang berada di bawah garis kemiskinan mutlak.¹⁵ Kebutuhan pokok dapat diterjemahkan dalam satu paket barang dan jasa yang diperlukan setiap orang untuk bisa hidup secara manusiawi.

Tanggapan utama terhadap kemiskinan adalah:

- a. Bantuan kemiskinan, atau membantu secara langsung kepada orang miskin. Ini telah menjadi bagian pendekatan dari masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan. Di Indonesia salah satunya berbentuk BLT.
- b. Bantuan terhadap keadaan individu. Banyak macam kebijakan yang dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman, pendidikan, kerja sosial, pencarian kerja, dan lain-lain.
- c. Persiapan bagi yang lemah. Daripada memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin, banyak negara sejahtera menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang lebih mungkin miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan. Persiapan bagi yang lemah juga dapat berupa pemberian pelatihan sehingga nanti yang bersangkutan dapat membuka usaha secara mandiri.¹⁶

¹⁵Emil Salim, *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1980), h. 41.

¹⁶Kammila Shaffirah, <https://en-gb.facebook.com/notes/muhammad-saw-sebagai-pedagang/ide-ide-pengentasan-kemiskinan-dalam-peradaban-islam/171295129553652>, diakses tgl 25-3-2015 08:50 am.

Di Indonesia, pemerintah berpendapat bahwa, jika rakyat turut menyumbang dalam suatu rencana, mereka akan bertanggung jawab terhadap rencana itu dan akan membanggakannya.¹⁷ Para perencana dan pelaksana program pembangunan telah lama menyadari pentingnya akses rumah tangga miskin terhadap kredit, terutama di wilayah pedesaan. Kredit dapat membuat rumah tangga untuk memulai atau memperluas aktivitas usaha dan pada waktu yang bersamaan meningkatkan produksi dan menciptakan surplus-surplus keuangan. Ini akan memajukan standar kehidupan yang lebih baik dan pembangunan secara berkesinambungan. Pengembangan penduduk dan undang-undang pembangunan keluarga sejahtera menjadi aspek hukum bagi semua kebijaksanaan dan program pengembangan penduduk dan pembangunan keluarga sejahtera.¹⁸

2. pengangguran

Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja tetapi tidak bekerja baik dalam arti mendapatkan upah atau bekerja mandiri, kemudian mencari pekerjaan dalam arti mempunyai kegiatan aktif dan ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya.

¹⁷Dorodjatun Kuntjoro dan Jakti, *Kemiskinan di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), h. 201.

¹⁸Sutyastie Soemitro Remi dan Prijono Tjiptoherijanto, *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 24.

Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah lainnya. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia dikenal istilah pengangguran terselubung, di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga sedikit dilakukan oleh lebih banyak orang. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah penganggur dan setengah penganggur yang besar, pendapatan relatif rendah dan kurang merata.

Budaya pilih-pilih pekerjaan juga menjadi salah satu penyebab tingginya angka pengangguran. Pada dasarnya setiap orang ingin bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikan, dan juga ditambah dengan sifat gengsi, maka tidak heran jika kebanyakan yang ditemukan di Indonesia bukan pengangguran terselubung, melainkan pengangguran terbuka yang didominasi oleh kaum intelektual (berpendidikan tinggi). Selain budaya memilih-milih pekerjaan, budaya negatif lain yang menjamur di Indonesia adalah budaya malas. Malas mencari pekerjaan sehingga jalan keluar lain yang ditempuh adalah dengan menyogok untuk mendapatkan pekerjaan. Tidak mau mengambil resiko juga menjadi sebuah penyebab pengangguran di Indonesia, terhitung sedikit orang yang mau mengambil resiko demi sebuah pekerjaan. Terlalu berfikir kepada keuntungan atau gaji yang akan diraih, tanpa menoleh kepada pengalaman yang mungkin bisa didapatkan.

Pembahasan tentang pengangguran tidak bisa lepas dari masalah ketenagakerjaan, yang meliputi kesempatan kerja, lapangan kerja dan pendidikan. Jika faktor-faktor tersebut berhubungan secara negatif maka terciptalah pengangguran. Tingkat pendidikan yang rendah akan menghasilkan peluang kerja yang rendah pula. Kesempatan kerja yang rendah bisa jadi diakibatkan oleh ketersediaan lapangan kerja yang jumlahnya sedikit. Sedangkan lapangan kerja yang sedikit tersebut biasanya hanya diperuntukkan bagi individu dengan keahlian (*skill*) yang memadai. Keahlian yang tinggi akan ditemukan pada kualitas individu yang berpendidikan tinggi, yang *notabene* berjumlah sedikit dari totalitas masyarakat yang ada. Konsekuensi logisnya adalah jumlah masyarakat berpendidikan rendah dan yang mayoritas tersebut harus rela dipinggirkan. Sehingga, jika terpaksa bekerja maka jenis pekerjaan yang didapatkan pasti termasuk kategori yang berkualitas rendah, yang itu tentu saja memberi kontribusi upah yang rendah pula. Hal demikian merupakan konstitusi ekonomi yang sengaja diciptakan. Kontribusi upah yang rendah secara ekonomis akan menjadikan tingkat pendidikan yang rendah dan berputar lagi pada lingkaran yang sama. Putaran-putaran yang demikian itu pada akhirnya adalah penciptaan angka pengangguran antardesa dan kota.¹⁹

C. Konsep Kesejahteraan Ekonomi dalam Konteks Ekonomi Islam

Definisi kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi di mana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan

¹⁹Saiful Arif, *Menolak Pembangunanisme*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 301.

makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai serta dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Menurut HAM, maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki-laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.²⁰

Menurut Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009, Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi bagi para pelaku ekonomi atau masyarakat. Dilihat dari pengertiannya, sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian “Islam” yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai, dari pengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sejalan dengan misi Islam itu sendiri.²¹

Kesejahteraan masyarakat menurut Biro Pusat Statistik Indonesia dapat diukur dengan beberapa indikator sebagai berikut:

²⁰Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 25.

²¹*Ibid*, h. 85.

1. Tingkat pendapatan keluarga
2. Komposisi pengeluaran rumah tangga
3. Tingkat pendidikan keluarga
4. Tingkat kesehatan keluarga
5. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga²²

Meningkatnya kesejahteraan rakyat yang adil dan merata merupakan tujuan dari pembangunan nasional Indonesia. Berbagai program dan kegiatan pembangunan telah dilaksanakan guna mencapai tujuan tersebut. Namun dimensi kesejahteraan rakyat disadari sangat luas dan kompleks, sehingga suatu taraf kesejahteraan rakyat hanya dapat dinilai melalui indikator-indikator yang terukur dari berbagai aspek pembangunan.²³

Umer Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*).²⁴ Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan

²²Adi Nugroho, http://www.eprints.undip.ac.id/38829/3/BAB_II.pdf, diakses tgl 26-03-2015 09:55 am.

²³Seksi Statistik Sosial, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar*, (Banjar: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, 2012), h. 2.

²⁴M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 7.

pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.

Secara terperinci, tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut, kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat, dan negara. Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil di bidang ekonomi.²⁵ Penggunaan sumber daya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak mubazir.

Ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh *falah* (kedamaian dan kesejahteraan dunia-akhirat). Pandangan hidup Islam didasarkan pada tiga konsep fundamental, yaitu *tauhid* (keesaan Allah), *khilafah*, dan '*adalah* (keadilan). Komitmen Islam yang demikian mendalam menyebabkan konsep kesejahteraan (*falah*) bagi semua umat manusia sebagai suatu tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia. Karena itu, memaksimalkan *output* total semata-mata tidak dapat menjadi tujuan dari sebuah masyarakat muslim. Memaksimalkan *output* harus dibarengi dengan menjamin usaha-usaha yang ditunjukkan kepada kesehatan rohani yang terletak pada batin

²⁵Warkum Sumito, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), h. 17.

manusia, keadilan, serta permainan yang *fair* pada semua peringkat interaksi manusia. Hanya pembangunan semacam inilah yang akan selaras dengan tujuan-tujuan syari'ah (*maqasid asy-syari'ah*).

Sementara, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spiritual menghendaki pembangunan moral, pemuasan kebutuhan materi menghendaki pembangunan umat manusia dan sumber-sumber daya materi dalam suatu pola yang merata sehingga semua kebutuhan umat manusia dapat dipenuhi secara utuh dan terwujud suatu distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil. Oleh karena Islam menganggap mengemis sebagai profesi yang tidak selaras dengan martabat inheren manusia sebagai *khalifatullah* maka setiap orang yang secara fisik dan mental normal, diharuskan untuk menopang kehidupan dirinya sendiri dan keluarganya. Hal ini tidak mungkin kecuali apabila tersedia fasilitas untuk melatih mereka menjadi lebih produktif melalui pengembangan kemampuannya, dan juga diberikan kesempatan untuk berwirausaha dan bekerja untuk mendapatkan gaji. Oleh karena itu, merupakan suatu kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) bagi masyarakat muslim untuk memberikan pembinaan latihan dan kesempatan kerja yang optimal.²⁶

Agar semua kebutuhan primer bisa terpenuhi secara menyeluruh serta dimungkinkan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersier, maka barang-barang ekonomi yang ada harus bisa diperoleh oleh manusia sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Sementara barang ekonomi tersebut tidak mungkin diperoleh, kecuali apabila mereka berusaha mencarinya.

²⁶M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 6.

Karena itu, Islam mendorong manusia agar bekerja, mencari rezeki tersebut adalah fardhu. Allah swt. berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 15:²⁷

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ضَدَلُو لِفَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ.....

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya...”

Islam telah mewajibkan bekerja kepada setiap orang serta memerintahkan mereka agar memanfaatkan kekayaan yang mereka peroleh. Semuanya itu dalam rangka mewujudkan kemajuan taraf perekonomian dalam suatu negara, sekaligus memuaskan kebutuhan-kebutuhan primer setiap orang, serta memberikan kesempatan kepada orang tersebut agar bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder atau tersiernya.²⁸

Islam telah menganggap masalah kemiskinan manusia dengan standar yang sama, di negara mana pun, serta kapan pun. Oleh karena itu, menurut pandangan Islam, masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh, dan syara' telah menetapkan kebutuhan primer tersebut berupa tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan papan. Allah swt. berfirman dalam surah At-Talaq ayat 6:²⁹

أَسْكِنُوا هُنَّ مَحَلَّاتٍ سَكَنْتُمْ مَنْوُجِدْكُمْ وَلَا تُضَارُّوا هُنَّ ضَيْفُوا عَلَيْهِنَّ.....

“Tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal sesuai dengan kemampuanmu....”

²⁷Dikutip oleh Moh. Maghfur Wachid dari Taqyuddin an-Nabhani, *An-Nidlam al-Iqtishadi fil-Islam*, (Beirut: Darul Ummah, 1990), h. 55.

²⁸Dikutip oleh Moh. Maghfur Wachid dari Taqyuddin an-Nabhani, *An-Nidlam al-Iqtishadi fil-Islam*, (Beirut: Darul Ummah, 1990), h. 55.

²⁹*Ibid.*

Ibnu Majah meriwayatkan hadits dari Abi Al-Ahwash yang mengatakan:
Rasulullah saw. bersabda:

ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ

“Ingatlah, bahwa hak mereka atas kalian adalah agar kalian berbuat baik kepada mereka dalam (memberikan) pakaian dan makanan.” (H.R. Ibnu Majah)

Semuanya ini menunjukkan bahwa kebutuhan-kebutuhan primer yang apabila tidak terpenuhi dianggap miskin adalah sandang, pangan, dan papan. Adapun hal-hal yang lain, selain sandang, pangan, dan papan tersebut, dianggap sebagai kebutuhan sekunder, sehingga orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder, meskipun kebutuhan-kebutuhan primernya sudah terpenuhi, tetap tidak bisa dianggap sebagai orang miskin. Jadi, kemiskinan dengan makna yang Islami adalah tidak terpenuhinya alat pemuas yang bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer tersebut merupakan masalah yang menjadi salah satu sebab kemunduran dan kehancuran suatu bangsa. Islam, bahkan telah menjadikan kemiskinan tersebut sebagai ancaman dari setan.³⁰

Faktor manusia memang sangat berperan bagi keberhasilan pembangunan baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat regional. Tuhan telah menciptakan alam untuk dinikmati manusia, tetapi juga sekaligus memerintahkan manusia untuk memelihara dan meningkatkan manfaatnya. Bagaimana gersangnya tanah, pasti masih mengandung potensi di dalamnya dan masih dapat

³⁰Dikutip oleh Moh. Maghfur Wachid dari Taqyuddin an-Nabhani, *An-Nidlam al-Iqtishadi fil-Islam*, (Beirut: Darul Ummah, 1990), h. 229.

memberikan sumber kehidupan bagi masyarakatnya. Maka sudah sewajarnya apabila manusia bersyukur atas kemurahan yang telah diberikan oleh Tuhan kepadanya. Proses menikmati hak dan menjalankan kewajiban yang diamanatkan Tuhan tersebut realisasinya dilakukan dengan wujud kegiatan pembangunan. Manusia yang berkedudukan dan berfungsi sebagai pelaksana perintah adalah rakyat, sedangkan manusia yang mempunyai wewenang untuk memberikan perintah adalah pemerintah. Jika dilihat dari segi ini, bagaimanapun juga manusia merupakan faktor yang paling dominan terhadap keberhasilan pembangunan.³¹

Pemerintah dan rakyat merupakan satu kesatuan terpenting dalam pembangunan., sehingga tujuan pembangunan akan dapat tercapai. Pembangunan tidak akan dapat terwujud apabila hanya dengan angan-angan saja. Oleh karena itu, pembangunan harus direncanakan dan dilaksanakan.³²

D. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi secara umum didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya penambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Menurut Suryana, terdapat empat teori atau model pembangunan ekonomi yang bisa diterapkan khususnya dalam pembangunan di Indonesia, yaitu:

³¹Ibnu Syamsi, *Pokok-pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 49.

³²*Ibid*, h. 39.

1. Model pembangunan yang berorientasi pertumbuhan, tujuan pokok strategi ini adalah meningkatkan laju produksi.
2. Model pembangunan ekonomi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja.
3. Model pembangunan yang berorientasi pada penghapusan kemiskinan.
4. Model pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar (*the basic necessary oriented*).

Pembangunan adalah industrialisasi yang diharapkan dapat menyediakan lapangan dan kesempatan kerja. Pembangunan adalah sarana yang dicita-citakan untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.³³ Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, maka diperlukan komponen-komponen pembangunan. Gant menyebutkan bahwa komponen-komponen pembangunan terdiri atas sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi.

*The components of development-natural resources, capital, technology, and manpower-must be brought into focus for the purpose. The government must provide an environment of safety and stability which at least permits and even encourages development.*³⁴

Walaupun kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan ekonomi selalu ditujukan untuk mempertinggi kesejahteraan dalam arti yang seluas-luasnya, kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai sebahagian dari keseluruhan usaha pembangunan yang dijalankan oleh suatu masyarakat.

³³Saiful Arif, *Menolak Pembangunanisme*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 303.

³⁴Dikutip dari George F. Gant, *Development Administration, Concept, Goals, Methods*, (London: University of Wisconsin Press, 1979), h. 5.

Pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha suatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakatnya, sedangkan keseluruhan usaha-usaha pembangunan meliputi juga usaha-usaha pembangunan sosial, politik dan kebudayaan. Dengan adanya pembatasan di atas maka pengertian pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang.³⁵

Pembangunan di daerah dengan melalui kegiatan-kegiatan proyek pembangunan harus dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengadakan perbaikan keadaan sosial-ekonominya. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus cukup cakap dalam mengelola proyek sesuai dengan peranannya. Jika strategi pembangunan itu meliputi daerah yang cukup luas dan menelan biaya yang sangat besar, maka dukungan kelancaran dan keberhasilan proyek harus juga datang dari pemerintah pusat.

E. Pemberdayaan Masyarakat melalui PNPM Mandiri

Hakekat pemberdayaan pada dasarnya adalah penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat bisa berkembang. Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap masyarakat pasti memiliki daya akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau potensi yang ada belum tergali untuk dikembangkan. Pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan, sehingga pemberdayaan sebaiknya mengantarkan pada proses

³⁵Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1985), h. 13.

kemandirian, dalam tinjauan ekonomi, terdapat tiga daya dalam model pemberdayaan, yaitu:

1. Daya manusia mencakup deskripsi dan potret secara kualitatif dan kuantitatif meliputi aspek pendidikan, wawasan ilmu pengetahuan, keterampilan dan kemampuan di sisi manajemen.
2. Daya lingkungan yaitu potensi yang dikembangkan berdasarkan kondisi geografis maupun alam yang ada di daerah.
3. Daya ekonomi merupakan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah untuk mendapatkan nilai ekonomi yang lebih tinggi dalam rangka meraih keberdayaan masyarakat.

Proses pemberdayaan masyarakat mendasarkan pada empat prinsip, yaitu:

1. Partisipatif, adalah proses pemberdayaan harus dilakukan secara demokratis dengan melibatkan semua *stakeholders* baik pemerintah, swasta, masyarakat, termasuk masyarakat miskin itu sendiri. Sehingga masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek namun subjek dalam perencanaan pemberdayaan.
2. Transparansi, adalah adanya keterbukaan di antara *stakeholders* sehingga setiap tahapan akan direncanakan, mulai dilaksanakan sampai dengan evaluasi dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Akuntabilitas, adalah perencanaan pemberdayaan nantinya dapat diimplementasikan dan tercapai tujuan serta sasarannya.
4. Manfaat bersama, adalah proses pemberdayaan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada upaya pembangunan masyarakat sebagai kontribusi untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Tiga pelaku penting yang terkait dalam pemberdayaan yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Suatu program akan berjalan efektif jika semua pihak duduk bersama tanpa ada kecurigaan, yang selama ini terjadi, kurang adanya koordinasi di antara lembaga-lembaga tersebut. Setiap departemen pemerintah, mempunyai program pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Namun tidak ada koordinasi yang jelas. Akibatnya mereka seakan berjalan sendiri-sendiri. Kalau ada yang mengkoordinir, maka hasilnya akan lebih efektif, untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, yang perlu dilakukan adalah memberdayakan masyarakat. Ini akan lebih efektif dibandingkan hanya memberikan bantuan yang sifatnya sesaat, yang dibutuhkan adalah pemberian akses kepada masyarakat tersebut. Hal inilah yang kurang dilakukan pemerintah, pemerintah perlu diberi akses kepada masyarakat dibanding ekonomi, sosial, budayadan sebagainya.

Masyarakat harus dibantu untuk bisa mencari makan sendiri. Jadi jangan hanyadiberi makan. Intinya adalah buatlah program-program pemberdayaan yang berkesinambungan. Pembangunan di bidang ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah pada dewasa ini disektor pertanian, perikanan, perkebunan, industri dan pertambangan, hakekatnya ditujukan selain untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, juga dimaksudkan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Seharusnya tidak semua masalah kemiskinan menjadi tanggung jawab pemerintah. Rasanya tidak *fair* kalau seluruhnya dibebankan hanya kepada pemerintah. Terutama golongan masyarakat yang mampu juga secara sukarela diharapkan dapat berkontribusi mengatasi masalah kemiskinan

yang terjadi di negeri ini. Program mengatasi kemiskinan yang paling murah adalah si kaya membantu si miskin atau si pandai membantu yang bodoh. Idealisme dan pengorbanan yang diperlukan untuk mengatasi kemiskinan di negeri ini bukan sesuatu yang berada di menara gading dan bukan pulayangdiada-adakan. Idealisme dan pengorbanan tersebut sesungguhnya adalah sebuah realita yang sudah terjadi di masyarakat.³⁶

Pemberdayaan mempunyai beberapa tahap, antara lain:

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar mampu mengambil peran dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuk inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantar pada tahap kemandirian.

Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, masyarakat diberdayakan dalam artian potensi yang ada di masyarakat digali untuk dikembangkan. PNPM-M merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. PNPM-M difokuskan pada program penanggulangan kemiskinan yang berbasis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. PNPM-M merupakan integrasi dan perluasan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis masyarakat dan

³⁶Laode Zainudin, <http://organisasi.org/pengertian-pengangguran-dan-jenis-macam-pengangguranfriksional-struktural-musiman-siklikal>, diakses tgl 25-03-2015 08:55 am.

sudah berjalan. PNPM-M yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia ada tiga jenis, yaitu:

1. PNPM M Perdesaan
2. PNPM-M Perkotaan
3. PNPM-M Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal

Tujuan PNPM-M secara umum adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Tujuan PNPM-M secara khusus yaitu:

1. meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan
2. melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal
3. mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif
4. menyediakan sarana prasarana dasar sosial dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat
5. melembagakan pengelolaan dana bergulir
6. mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja Sama Antar Desa dalam pengelolaan pembangunan
7. mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan

Visi PNPM-M adalah mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin di perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Misi PNPM-M yaitu:

1. meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
2. pelembagaan sistem pembangunan partisipatif
3. mengoptimalkan fungsi dan peran pemerintah lokal
4. peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dasar masyarakat
5. pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan

Keluaran (*Output*) Program PNPM-M yaitu:

1. terjadinya peningkatan keterlibatan rumah tangga miskin dan kelompok perempuan mulai perencanaan sampai dengan pelestarian
2. terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di desa dan antar desa
3. terjadinya peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif
4. berfungsi dan bermanfaatnya hasil kegiatan PNPM-MPd bagi masyarakat
5. terlembaganya pengelolaan dana bergulir dalam peningkatan pelayanan sosial dasar dan ketersediaan akses ekonomi terhadap rumah tangga miskin
6. terbentuk dan berkembangnya kerja sama antar desa dalam pengelolaan pembangunan

7. terjadinya peningkatan peran serta dan kerja sama para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan

Prinsip PNPM-M yaitu:

1. bertumpu pada pembangunan manusia
2. otonomi
3. desentralisasi
4. berorientasi pada masyarakat miskin
5. partisipasi
6. kesetaraan dan keadilan gender
7. demokratis
8. transparansi dan akuntabel
9. prioritas
10. keberlanjutan

Jenis kegiatan PNPM-M yaitu:

1. kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana prasarana dasar yang dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi rumah tangga miskin
2. kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan nonformal)
3. kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal

4. penambahan permodalan simpan pinjam khusus kelompok perempuan (SPP)

Kriteria kegiatan PNPM-M antara lain:

1. lebih bermanfaat bagi rumah tangga miskin
2. berdampak langsung pada kesejahteraan
3. berpotensi untuk berkembang dan berkelanjutan
4. didukung sumber daya yang ada
5. bisa dikerjakan oleh masyarakat

Dasar hukum pelaksanaan PNPM-M adalah petunjuk umum PNPM-M 2007, mengacu pada landasan Pancasila dan landasan konstitusional UUD RI 1945 beserta amandemennya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang terkait sistem pemerintahan, perencanaan, keuangan negara dan kebijakan penanggulangan kemiskinan serta landasan khusus pelaksanaan PNPM-M.

Salah satu program dari PNPM-MPd yaitu pinjaman dana bergulir atau yang sering disebut dengan SPP (Simpan Pinjam Perempuan). Dana bergulir adalah seluruh dana program dan bersifat pinjaman dari UPK yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat. Kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM-MPd bertujuan:

1. Memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha
2. Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program

3. Peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir di tingkat wilayah perdesaan
4. Menyiapkan kelembagaan UPK sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan dan berkelanjutan
5. Peningkatan pelayanan kepada rumah tangga miskin dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat

Dalam memberikan dukungan terhadap PNPM-MPd yang mempunyai tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan maka kegiatan pengelolaan dana bergulir menjadi salah satu kegiatan yang memberikan kemudahan bagi rumah tangga miskin untuk mendapatkan permodalan dalam bentuk kegiatan SPP.

Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja. Tujuan khusus kegiatan ini yaitu:

1. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar
2. Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha
3. Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan

Ketentuan dasar kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yaitu:

1. Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan
2. Terlembagakan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman
3. Keberdayaan, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan
4. Pengembangan, artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat perdesaan
5. Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

Partisipasi kaum perempuan dalam usahanya meningkatkan perekonomian keluarga sekarang ini sudah dapat dilakukan secara luas oleh kaum perempuan di desa. Mereka dapat mengakses dana PNPM-MPd yang ada di UPK, sebagai modal kerja usaha. Peranan perempuan semakin aktif dalam semua tahapan program baik pada kegiatan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan atau pelestarian.

UPK juga sangat berperan penting di sini karena yang mengelola kegiatan program adalah UPK. Pengertian UPK menurut Petunjuk Teknis Operasional bahwa UPK adalah Unit Pengelola Kegiatan yang mengelola dana bantuan masyarakat, baik dari program pengembangan kecamatan maupun PNPM-M yang

dapat dialokasikan untuk berbagai jenis kegiatan yang mencakup kegiatan sarana prasarana, pendidikan, kesehatan, UEP dan SPP / dana bergulir.

Peran UPK adalah sebagai unit pengelola dan operasional pelaksanaan kegiatan antar desa. UPK mendapatkan penugasan MAD/BKAD untuk menjalankan tugas pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana perguliran.

Tugas dan tanggung jawab umum UPK:

1. mengelola dana PPK maupun PNPM-M di Kecamatan
2. mengelola administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PPK maupun PNPM-M
3. mengelola dokumen-dokumen PPK maupun PNPM-M
4. mengelola dana bergulir dan BLM yang dialokasikan untuk UEP dan atau SPP, maupun dari sumber lain dari program pemerintah dan swasta
5. melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam

Tugas dan tanggung jawab khusus UPK:

1. melakukan sosialisasi dan penegakkan prinsip-prinsip PNPM-M dalam perencanaan dan pelestarian PNPM-M
2. melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi keuangan maupun nonkeuangan
3. membuat perencanaan keuangan dan rencana kerja
4. membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja kepada MAD

5. melakukan evaluasi dan pemeriksaan RPD serta LPD yang dibuat desa dalam setiap tahapan proses
6. melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan administrasi pelaporan pelaku desa
7. membuat draf rencana perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM-M
8. melakukan fasilitasi kerja sama dengan pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah
9. melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok dan pemanfaat
10. membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan dan pendampingan dalam setiap tahap kegiatan
11. mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya
12. bersama pelaku lainnya melakukan fasilitasi penyelesaian masalah³⁷

³⁷Sumber: Kantor UPK PNPM-MPd wilayah Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar.

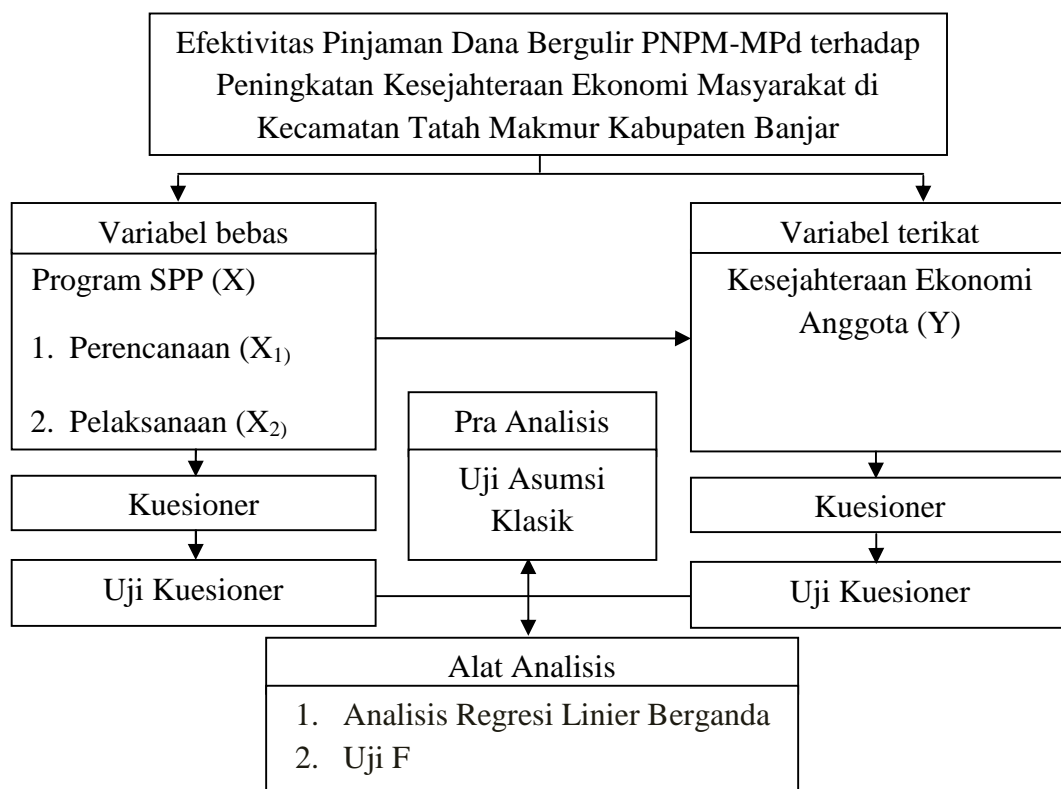
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan untuk menggali data dan permasalahan. Adapun sifat penelitian ini adalah kuantitatif. Lokasi penelitian sendiri di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar yang terdiri dari 13 desa.

B. Desain Penelitian



C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Sebagai objek penelitian adalah efektivitas program SPP PNPM-MPd terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang menjadi anggota kelompok program SPP di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar.

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menjadi anggota kelompok program SPP PNPM-MPd di wilayah Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menjadi anggota program SPP PNPM-MPd di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar yang tersebar di 13 desa, berjumlah 396 orang dan terdiri dari 33 kelompok. Populasi ini bersifat heterogen yang dapat dilihat dari beragamnya usia.

Sampel ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini tidak seluruh anggota populasi diambil,

³⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 80.

melainkan hanya sebagian dari populasi. Teknik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan *Non Probability Sampling*, yaitu semua elemen dalam populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Hal ini dilakukan karena mengingat keterbatasan waktu yang ada. Teknik penarikan sampel seperti ini dapat digunakan jika peneliti tidak memiliki kerangka sampel yang memadai.³⁹ Metode pengambilan sampelnya menggunakan *Accidental Sampling*, metode ini merupakan prosedur *sampling* yang memilih sampel dari orang atau unit yang paling mudah dijumpai atau diakses.⁴⁰ Sampel dapat terpilih karena berada pada waktu, situasi dan tempat yang tepat. Teknik penentuan sampel ini berdasarkan kebetulan, yaitu siapa yang kebetulan bertemu dengan peneliti atau mudah dijumpai dapat dijadikan sampel jika dipandang cocok. Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel.⁴¹ Penentuan banyak sampel penelitian menurut *Slovin* dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

Di mana:

n = banyak sampel

N = banyak populasi

e = persentase kesalahan yang diinginkan atau ditolerir

³⁹Muhaimin, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2010), h. 92.

⁴⁰Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 174.

⁴¹V. Wiratna Sujarweni, *SPSS untuk Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 16.

Untuk itu, dalam penelitian ini sampel yang diambil dengan error 10% adalah:⁴²

$$n = \frac{396}{1+(396 \times 0,10^2)} = 79,84 \text{ digenapkan menjadi } 80 \text{ responden}$$

Jadi, ukuran sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 80 responden.

E. Data dan Sumber Data

1. Data

Agar penelitiannya dapat betul-betul berkualitas, data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari responden yang didapatkan melalui instrumen pengumpulan data yang berbentuk kuesioner/angket.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen (tabel, catatan, dan lain-lain), foto-foto dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.⁴³ Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data penunjang yang didapatkan dari Kantor UPK PNPM-MPd dan dari Kantor Kecamatan di wilayah Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar.

⁴²Danang Sunyoto, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Yogyakarta: CAPS, 2011), h. 21.

⁴³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), h.21-22.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Responden yaitu: subjek yang telah ditetapkan yakni adalah masyarakat yang menjadi anggota kelompok dalam program SPPPNPM-MPd di wilayah Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar.
- b. Informan yaitu: semua karyawan kantor UPK PNPM-MPd dan karyawan kantor Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar, serta aparat-aparat desa yang bertugas mengelola program.
- c. Dokumen yaitu: berupa berkas-berkas atau arsip data mengenai hal yang diteliti penulis.⁴⁴

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu:

1. Penelitian pustaka (*library research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku, jurnal, skripsi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan judul penelitian yang dibahas.
2. Penelitian lapangan (*field research*) adalah metode pengumpulan data dimana peneliti langsung terjun ke objek yang diteliti, melalui:
 - a. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan

⁴⁴Suliyanto, Metode Riset Bisnis, (Yogyakarta: Andi, 2006), h. 131.

yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki, disebut observasi langsung. Sedang observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki.⁴⁵

b. Kuesioner (angket)

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan-pertanyaan untuk diisi sendiri oleh responden. Responden adalah orang yang memberikan tanggapan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.⁴⁶

c. Dokumentasi

Dokumen adalah kumpulan fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk teks dan artefak. Hampir setiap penelitian menggunakan teknik ini sebagai teknik pengumpulan data sekunder. Untuk pencarian data sekunder ini lebih cocok menggunakan teknik dokumentasi.⁴⁷

G. Desain Pengukuran

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala ini disebut juga sebagai *method of summated ratings* karena nilai peringkat setiap jawaban atau tanggapan dijumlahkan sehingga mendapat nilai total. Skala likert ini terdiri atas sejumlah pertanyaan yang semuanya digunakan untuk mengukur

⁴⁵S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h.158-159.

⁴⁶Muhaimin, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2010), h. 96.

⁴⁷*Ibid.*, h.131.

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu objek tertentu. Dalam skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan-pertanyaan.

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert biasa menyediakan sejumlah alternatif tanggapan yang berjenjang atau bertingkat. Dalam penelitian ini alternatif tanggapan diberi skor dari yang tertinggi yaitu 5 dengan pilihan jawaban “a” sampai dengan skor terendah yaitu 1 dengan pilihan jawaban “e”.

H. Teknik Analisis Data

1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

a. Uji validitas

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis butir. Uji validitas disini dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor pada item dengan skor total itemnya. Skor item dianggap sebagai nilai X sedangkan skor total dianggap sebagai nilai Y. Apabila skor item memiliki korelasi positif yang signifikan berarti item tersebut dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur variabel tersebut.

Sebuah butir pertanyaan yang dianggap valid bila koefisien korelasi *Product Moment Pearson* di mana $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$ ($\alpha=5\%$; $n-2$) dan n = jumlah sampel.

Uji validitas pada penelitian ini menggunakan uji validitas *Pearson Corellation*.

Rumus yang digunakan :

$$r_{xy} = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n\sum x^2 - (\sum x)^2)(n\sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Keterangan:

r_{xy} : koefisien korelasi antara variabel x dan y

x : Jumlah harga dari skor butir

y : Jumlah harga dari skor total

n : Jumlah subjek

xy : Jumlah perkalian skor butir dengan skor total

x^2 : Jumlah kuadrat dan skor butir

y^2 : Jumlah kuadrat dan skor total

Perhitungan uji validitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS 13 for windows.

b. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini adalah menggunakan *Cronbach Alpha* yang berguna untuk mengetahui apakah alat ukur yang dipakai *reliable* (handal).

Ketentuan uji reliabilitas dengan *Cronbach Alpha*:

- 1) Nilai *Cronbach's Alpha* positif tidak boleh negatif
- 2) Nilai *Cronbach's Alpha* hasil perhitungan sama atau lebih besar dari 0,6

Rumus *Cronbach's Alpha*:

$$r_n = \frac{k - \bar{r}}{1(k - 1)\bar{r}}$$

Keterangan:

r : rata-rata korelasi antar item

k : jumlah item

Perhitungan uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS 13 for windows.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dibutuhkan untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu model regresi yang akan dipakai sebagai penjelas bagi pengaruh antar variabel. Model regresi yang digunakan adalah model regresi linear berganda (*multiple regression*). Setidaknya ada lima syarat yang dikehendaki dalam model analisis regresi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Uji normalitas

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi tersebut variabel dependen, variabel independen, atau keduanya berdistribusi normal atau tidak. Syarat untuk mendapatkan model regresi yang baik adalah distribusi datanya normal atau mendekati normal.

Cara mendeteksi dengan menggunakan *histogram regression residual* yakni distribusi data dengan berbentuk lonceng (*bellshaped*), dan juga pada diagram *normal P-P plot regression standardized* yang menggambarkan keberadaan titik-titik disekitar garis dan pada *scatter plot* tampak titik-titik menyebar yang kesemuanya menunjukkan model berdistribusi normal.⁴⁸

⁴⁸Suliyanto, *Analisis Data dalam Aplikasi Pemasaran*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h.69.

b. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah keadaan di mana terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain pada model regresi. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Untuk mengetahuinya akan dilakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *spearman's rho*, yaitu mengkorelasikan nilai residual (*Unstandardized residual*) dengan masing-masing variabel independen. Jika signifikansi korelasi kurang dari 0,05 maka pada model regresi terjadi masalah heteroskedastisitas.⁴⁹

Menurut Sarwoko, terdapat beberapa alasan munculnya persoalan heteroskedastisitas.⁵⁰

- 1) Database dari satu atau lebih variabel mengandung nilai-nilai dengan suatu jarak (range) yang lebar antara nilai yang paling kecil dengan nilai yang paling besar.
- 2) Perbedaan laju pertumbuhan antara variabel-variabel dependen dan independen adalah signifikan dalam periode pengamatan untuk data runtut waktu.
- 3) Didalam data itu sendiri terdapat heteroskedastisitas, terutama pada data seksi silang.

Apabila kondisi-kondisi tersebut dapat dipenuhi, maka varian pada nilai

⁴⁹*Ibid.*,h. 84.

⁵⁰Sarwoko, *Dasar-Dasar Ekonometrika*, (Yogyakarta:Andi,2005),h.152.

residual akan berkorelasi dengan suatu variabel independen. Dengan demikian, apabila nilai varian independen berubah naik atau turun, varian nilai residu itu juga akan berubah naik dan turun dan disebut dengan persoalan heterokedastisitas.

c. Uji multikolinieritas

Multikolinearitas artinya antar variabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna. Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi yang tinggi atau variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol,⁵¹ maka terjadi multikolinearitas. Dalam model regresi yang baik, seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi di antara variabel independen, karena koefisien regresi hasil estimasi dapat berfluktuasi (tidak tetap) dari sampel ke sampel, menjadi berisiko jika memakainya sebagai indikator kepentingan relatif variabel prediktor.

Untuk mengetahui ada tidaknya Multikolinearitas antar variabel, dapat dilihat dari *variabel inflation faktor* (VIF) faktor pertambahan ragam. Data memenuhi syarat jika *variance inflation factors* (VIF) lebih kecil dari 5, karena menurut santoso (2001), pada umumnya jika VIF lebih besar dari 5, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikoleniaritas dengan variabel bebas lainnya.⁵²

⁵¹Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001), h. 57.

⁵²Duwi Priyatno, *Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS*, (Jakarta: Mediakom, 2010), h. 81.

d. Uji autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi dimana variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Maksud korelasi dengan diri sendiri adalah bahwa nilai dari variabel dependen tidak berhubungan dengan nilai variabel itu sendiri, baik nilai variabel sebelumnya atau nilai periode sesudahnya. Autokorelasi merupakan gejala terjadinya korelasi diantara data pengamatan, karena data dipengaruhi oleh data sebelumnya. Teknik pengujian autokorelasi adalah *Durbin Watson Test* dengan ketentuan sebagai berikut:⁵³

- 1) Jika d lebih kecil dari dl atau lebih besar dari $(4-dl)$, maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi
- 2) Jika d terletak antara du dan $(4-du)$, maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi
- 3) Jika d terletak antara dl dan du atau diantara $(4-du)$ dan $(4-dl)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

3. Analisis Efektivitas

Untuk mengetahui tingkat efektivitas Program SPP PNPM-MPd di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar, dilakukan dengan menganalisis hasil pengukuran yang diperoleh dari instrumen penelitian dalam hal ini adalah kuesioner. Penentuan tingkat efektivitas program menggunakan nilai rata-rata tertimbang dari masing-masing instrumen penelitian. Setiap item instrumen penelitian diberi nilai penimbang yang sama, dengan asumsi tidak ada yang saling mendominasi. Nilai penimbang diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

⁵³Singgih Santoso, *Buku Latihan SPSS Statistic Parametric*, (Jakarta: PT. Alex Media Komputendo, 2001), h.37.

$$NP = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}}$$

$$= \frac{1}{15} = 0,067$$

Karena instrumen yang digunakan berjumlah 15, maka berdasarkan rumus di atas, diperoleh Nilai Penimbang (NP) sebesar 0,067. Selanjutnya untuk memperoleh nilai efektivitas Program SPP digunakan pendekatan nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM = \sum \frac{\text{Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Unsur yang terisi}} \times NP$$

Berikut tabel untuk menentukan interpretasi terhadap penilaian efektivitas Program SPP PNPM-MPd di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar:

Tabel 3.1

Interpretasi Efektivitas

No	Nilai Persepsi	Interval Nilai Rerata Tertimbang	Interpretasi
1	1	1,00 – 1,80	Tidak efektif
2	2	1,81 – 2,60	Kurang efektif
3	3	2,61 – 3,40	Cukup efektif
4	4	3,41 – 4,20	Efektif
5	5	4,21 – 5,00	Sangat efektif

Sumber: Lampiran Kepmenpan Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis statistiknya menggunakan regresi linier berganda. Analisis ini dipergunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Perhitungan regresi linier berganda dilakukan dengan menggunakan program SPSS 13 for windows.

Analisis regresi berganda adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel x terhadap satu variabel dependen Y , yang dinyatakan dengan persamaan:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2$$

Keterangan:

Y : kesejahteraan ekonomi masyarakat

x_1 : perencanaan

x_2 : pelaksanaan

a : nilai konstanta

b : koefisien regresi

5. Uji Regresi Secara Simultan (Uji F)

Untuk membuktikan hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini dilakukan uji serempak (uji F). Dalam penelitian ini ditetapkan tingkat kepercayaan (*confidence interval*) = 95% ($\alpha = 5\%$). Uji ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel-variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) secara bersama-sama. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau dengan *level of significany* () sebesar 5% dengan *Degree of freedom* (df) = $(k-1)(n-k)$.

Hipotesis yang diajukan adalah:

H_0 : tidak ada pengaruh antara perencanaan(X_a) dan Pelaksanaan(X_b) program, secara serempak terhadap peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Anggota

H_1 : ada pengaruh antara Perencanaan(X_a) dan Pelaksanaan(X_b) program, secara serempak terhadap peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Anggota

Kriteria pengujian:

Dengan *level of significany* (α) = 0,05

Degree of freedom (df) = (k-1)(n-k)

H_0 diterima dan H_a ditolak, jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau Sig. >

H_a diterima dan H_0 ditolak, jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau Sig.

Perhitungan regresi secara simultan (uji F) dilakukan dengan menggunakan program SPSS 13 for windows.

I. Variabel Penelitian

Variabel independen atau variabel bebas (X) adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikat. Variabel independen atau variabel bebas (X) pada penelitian ini adalah Program SPP PNPM-MPd.

Variabel dependen atau variabel terikat (Y) adalah variabel yang besar kecilnya tergantung pada nilai variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependen atau variabel terikat (Y) adalah Kesejahteraan Ekonomi masyarakat

yang menjadi anggota program SPP PNPM-MPd di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar.

Indikator masing-masing variabel pada instrumen penelitian adalah:

Variabel program Simpan Pinjam Perempuan, dengan dimensi:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan

Variabel kesejahteraan masyarakat yang menurut Biro Pusat Statistik Indonesia dapat diukur dengan beberapa indikator sebagai berikut:

1. Tingkat pendapatan keluarga
2. Komposisi pengeluaran rumah tangga
3. Tingkat pendidikan keluarga
4. Tingkat kesehatan keluarga
5. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga

J. Prosedur Penelitian

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini hingga siap dimunaqasahkan, ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mempelajari secara langsung dan secara seksama yang akan diteliti dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Hasilnya kemudian dituangkan dalam sebuah desain operasional penelitian yang berjudul “Efektivitas Pinjaman Dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) terhadap Kesejahteraan Ekonomi

Masyarakat di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar”. Untuk kesempurnaannya maka dikonsultasikan kepada dosen penasehat dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Setelah disidangkan dan dinyatakan diterima, keluarnya surat penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing I dan II, selanjutnya dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya, lalu kemudian diseminarkan.

2. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis terlebih dahulu mengurus surat riset, kemudian melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan angket, sehingga diperoleh data yang diperlukan. Untuk melakukan riset ini maka diperlukan waktu 2 (dua) bulan sesuai dengan surat perintah riset dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini penulis mengolah data yang diperoleh berdasarkan teknik editing, kategorisasi, dan interpretasi yang semuanya dituangkan dalam laporan hasil penelitian. Untuk memperoleh simpulan mengenai permasalahan ini maka, dilakukan analisis secara kuantitatif.

4. Tahapan Penyusunan Akhir (penyempurnaan)

Pada tahap ini penulis menyusun secara sistematis terhadap data yang telah diperoleh berdasarkan kepada sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada dosen pembimbing I dan II, selanjutnya diadakan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan hingga dianggap

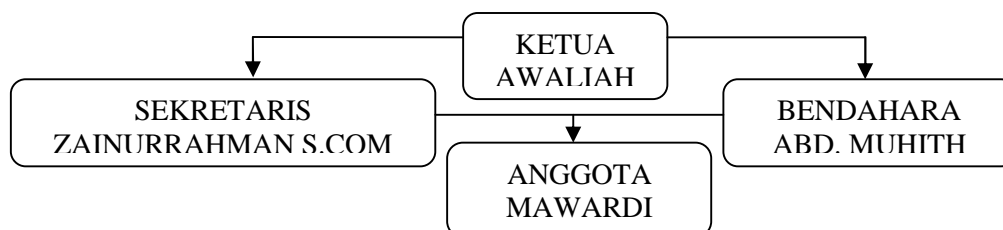
sempurna dan menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap untuk dimunaqasahkan.

BAB IV
LAPORAN HASIL PENELITIAN
DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di wilayah Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar yang kantornya beralamat di Jl. Warga Jaya No.30 Rt.02 Desa Tampang Awang, kecamatan ini adalah kecamatan baru hasil pemekaran dari Kecamatan Kertak Hanyar yang berdiri pada tahun 2009 dan terdiri dari 13 desa, yaitu desa Tatah Bangkal, Bangkal Tengah, Mekar Sari, Pandan Sari, Tatah Layap, Layap Baru, Thaibah Raya, Tampang Awang, Pemangkih Tengah, Pemangkih Baru, Pemangkih Darat, Tatah Jaruju, dan Jaruju Laut. Jumlah penduduknya sebesar 12.581 dan letak geografisnya yaitu 114° Lintang Selatan dan 3° Bujur Timur, sebelah Utara berbatasan dengan Kota Banjarmasin, Timur dengan Kecamatan Kertak Hanyar, Selatan dengan Kecamatan Gambut, dan Barat dengan Kecamatan Aluh-aluh. Sedangkan Kantor UPK sendiri beralamat di Jl. Pemangkih Baru RT.01, kondisi kantor saat ini masih menggunakan rumah yang disewa dari penduduk setempat, tetapi sudah ada rencana pembangunan untuk kantor UPK.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi UPK



Sumber: Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MPd Kec. Tatah Makmur Kab. Banjar 2015.

B. Penyajian Data dan Hasil Analisis Data

1. Karakteristik Responden

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada para anggota kelompok SPP di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar yang menjadi responden. Hasil total kuesioner yang dibagikan adalah kepada 80 responden. Adapun profil responden jika dilihat berdasarkan umur, jenis kelamin, dan pekerjaan adalah sebagai berikut:

a. Umur Responden

Tabel 4.1

Karakteristik Responden berdasarkan Umur

No.	Kelompok Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	20 - 30 Tahun	21	26,25
2	31 - 40 Tahun	18	22,5
3	> 40 Tahun	41	51,25
	Total	80	100

Sumber: hasil penelitian 2015 (Data diolah)

Keadaan umur responden dikelompokkan menjadi tiga kelompok dengan masing-masing jumlah frekuensi dan persentase memperoleh data yang berbeda. Kelompok 20 - 30 tahun memperoleh frekuensi sebesar 21 orang atau sebesar 26,25 %. Kelompok 31 - 40 sebanyak 18 orang atau sebesar 22,5%. Sementara kelompok umur > 40 tahun sebanyak 41 orang atau sebesar 51,25%.

b. Jenis Kelamin Responden

Tabel 4.2

Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Perempuan	80	100

2	Laki-laki	0	0
	Total	80	100

Sumber: hasil penelitian 2015 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan data yang diperoleh melalui penyebaran angket memperlihatkan bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin seluruhnya adalah perempuan dengan persentase 100%.

c. Pekerjaan Responden

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Petani	32	40
2	Pedagang	27	33,75
3	Peternak	21	26,25
	Total	80	100

Sumber: hasil penelitian 2015 (Data diolah)

Dari data di atas maka dapat disimpulkan pekerjaan terbanyak responden adalah petani sebanyak 32 orang atau sebesar 40%. Kemudian disusul pedagang sebanyak 27 orang atau sebesar 33,75%. Sementara peternak sebanyak 21 orang atau sebesar 26,25%.

2. Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

a. Uji Validitas

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis butir. Uji validitas di sini dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor pada item dengan skor total itemnya. Skor item dianggap sebagai nilai X sedangkan skor total dianggap sebagai nilai Y. Apabila skor item memiliki korelasi positif yang signifikan berarti item tersebut dapat digunakan sebagai

indikator untuk mengukur variabel tersebut. Sebuah butir pertanyaan yang dianggap valid bila koefisien korelasi *Product Moment Pearson* di mana r -hitung $>$ r -tabel ($\alpha=5\%$; $n-2$) dan n = jumlah sampel.⁵⁴

Uji validitas pada penelitian ini menggunakan uji validitas *Pearson Corellation*. Berikut hasil dari uji validitas penelitian dengan bantuan SPSS 13 for windows (dapat dilihat pada lampiran) pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Variabel Perencanaan (X_1)

Variabel	Pertanyaan	r -hitung	r -tabel	Keterangan
Perencanaan	1	0,735	0,22	Valid
	2	0,759	0,22	Valid
	3	0,693	0,22	Valid
	4	0,754	0,22	Valid
	5	0,706	0,22	Valid

Sumber: hasil penelitian 2015 (Data diolah)

Dari hasil uji validitas variabel Perencanaan (X_1) di atas dapat dilihat bahwa nilai r hitung yaitu masing-masing sebesar (0,735), (0,759), (0,693), (0,754), dan (0,706) berada di atas r tabel yaitu sebesar 0,22. Ini dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan pada variabel Perencanaan (X_1) valid.

Tabel 4.5
Variabel Pelaksanaan (X_2)

Variabel	Pertanyaan	r -hitung	r -tabel	Keterangan
Pelaksanaan	6	0,665	0,22	Valid
	7	0,782	0,22	Valid
	8	0,772	0,22	Valid
	9	0,640	0,22	Valid

⁵⁴*Ibid.*

	10	0,756	0,22	Valid
--	----	-------	------	-------

Sumber: hasil penelitian 2015 (Data diolah)

Dari hasil uji validitas variabel Pelaksanaan (X_2) di atas dapat dilihat bahwa nilai r hitung yaitu masing-masing sebesar (0,665), (0,782), (0,772), (0,640), dan (0,756) berada diatas r tabel yaitu sebesar 0,22. Ini dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan pada variabel Pelaksanaan (X_2) valid.

Tabel 4.6
Variabel Kesejahteraan Ekonomi Anggota (Y)

Variabel	Pertanyaan	r -hitung	r -tabel	Keterangan
Kesejahteraan Ekonomi	11	0,748	0,22	Valid
	12	0,854	0,22	Valid
	13	0,743	0,22	Valid
	14	0,684	0,22	Valid
	15	0,800	0,22	Valid

Sumber: hasil penelitian 2015 (Data diolah)

Dari hasil uji validitas variabel Kesejahteraan Ekonomi Anggota (Y) di atas dapat dilihat bahwa nilai r hitung yaitu masing-masing sebesar (0,748), (0,854), (0,743), (0,684), dan (0,800) berada di atas r tabel yaitu sebesar 0,22. Ini dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan pada variabel Kesejahteraan Ekonomi Anggota (Y) valid.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas instrumen digunakan untuk mengetahui apakah alat ukur yang dipakai reliabel/handal.⁵⁵ Uji reliabilitas umumnya menggunakan koefisien alfa.

⁵⁵. Tony Wijaya, *Cepat Menguasai SPSS 19 untuk olah & interpretasi data penelitian skripsi*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2002), h. 112.

Koefisien alfa biasa diukur dengan menggunakan statistik *Cronbach's Alpha* dengan ketentuan:

- 1) Nilai *Cronbach's Alpha* positif tidak boleh negatif
- 2) Nilai *Cronbach's Alpha* hasil perhitungan sama atau lebih besar dari 0,6 (Suliyanto dari Sekaran, 1992)

Berikut hasil uji reliabilitas penelitian dengan SPSS 13 (dapat dilihat pada lampiran) pada tabel berikut :

Tabel 4.7
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Data

Variabel	Pertanyaan	Alpha Cronbach	Keterangan
Perencanaan	1	0,734	<i>Reliabel</i>
	2	0,725	<i>Reliabel</i>
	3	0,747	<i>Reliabel</i>
	4	0,734	<i>Reliabel</i>
	5	0,751	<i>Reliabel</i>
Pelaksanaan	6	0,777	<i>Reliabel</i>
	7	0,677	<i>Reliabel</i>
	8	0,696	<i>Reliabel</i>
	9	0,733	<i>Reliabel</i>
	10	0,689	<i>Reliabel</i>
Kesejahteraan Ekonomi Anggota	11	0,804	<i>Reliabel</i>
	12	0,750	<i>Reliabel</i>
	13	0,799	<i>Reliabel</i>
	14	0,813	<i>Reliabel</i>
	15	0,773	<i>Reliabel</i>

Sumber: hasil penelitian 2015 (Data diolah)

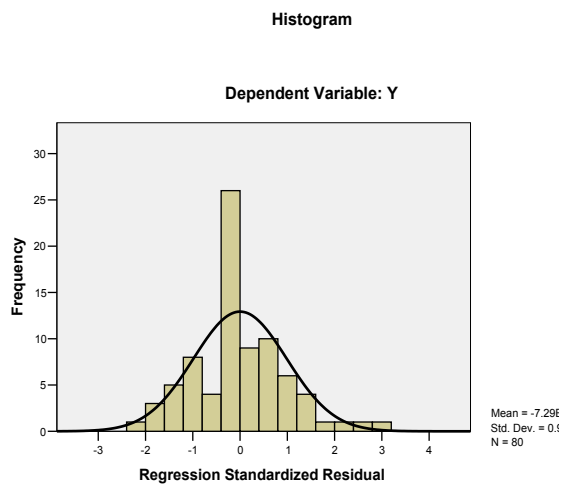
Dari uji reliabilitas di atas dapat diketahui bahwa semua angka nilai *Cronbach's Alpha* untuk masing-masing pertanyaan pada kolom lebih besar dari 0,6 dan bernilai positif. Ini berarti menunjukkan bahwa data yang diuji dapat dikatakan reliabel karena melebihi dari nilai 0,6 dan bernilai positif.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

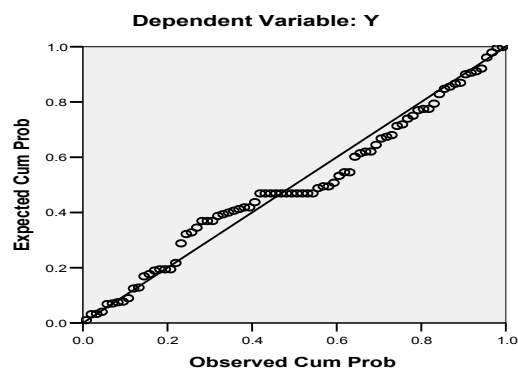
Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan *histogram regression residual* serta melihat diagram *normal P-P Plot regression standardized* dengan bantuan *spss 13 for windows* yang dihasilkan gambar sebagai berikut:

Gambar 4.2



Gambar 4.3

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

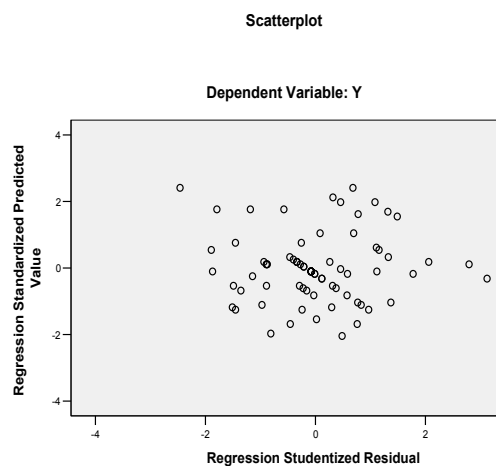


Melihat dari histogram menunjukkan bahwa gambar 4.2 di atas berbentuk lonceng dan juga pada grafik tersebut (gambar 4.3) terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Dalam uji ini regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas karena data *cross section* memiliki data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar). Berikut hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan SPSS 13 *for Windows*:

Gambar 4.4
Hasil Dari Uji Heteroskedastisitas



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik yang acak di atas tidak menunjukkan pola apapun sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

c. Uji Multikolinieritas

Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas antar variabel, salah satu caranya adalah dengan melihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Jika nilai VIF tidak lebih dari 5, maka model tidak terdapat multikolinieritas. Hal ini menunjukkan tidak terjadinya gejala multikolinieritas artinya tidak adanya hubungan antar variabel bebas.

Setelah melalui perhitungan SPSS 13 *for windows*, nilai VIF dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Dari Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
	(Constant)	3,775	1,514				2,493	,015		
1 X1	,108	,101	,106	1,075	,286	,424	,122	,091	,728	1,373
X2	,649	,106	,609	6,147	,000	,664	,574	,520	,728	1,373

Dari tabel diatas, terlihat pada bagian *Coefficient* untuk variabel Perencanaan (X1) dan Pelaksanaan (X2) menunjukkan angka VIF <5 sebesar (1,373) dan (1,373), sehingga tidak terjadinya gejala multikolinieritas artinya tidak adanya hubungan antar variabel bebas.

d. Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada

periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin – Watson (D-W) dengan tingkat kepercayaan $\alpha = 5$. Jika $d/D-W$ terletak antara du dan $(4-du)$, berarti tidak ada autokorelasi.

Tabel 4.9

Hasil Dari Uji Autokorelasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,671 ^a	,450	,435	1,687	1,719

a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y

1) Menentukan Hipotesis

- a) H_0 : Tidak ada autokorelasi
- b) H_1 : ada autokorelasi

2) Menentukan nilai du dan $4-du$ dengan nilai d tabel

- a) $d_l (n= 80, k = 2) = 1,5859, du (n=80, k = 2) = 1,6882$ (lihat pada lampiran)
- b) $4-du = 4-1,6882 = 2,3118$

3) Hasil

- a) Nilai $4-du (2,3118) > D-W (1,719) > dU (1,6882)$
- b) Karena nilai $d/D-W$ terletak antara du dan $(4-du)$, maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi

4. Hasil Analisis Efektivitas

Penentuan tingkat efektivitas program menggunakan nilai rata-rata tertimbang dari masing-masing instrumen penelitian. Karena instrumen yang digunakan berjumlah 15, maka berdasarkan rumus pada bab III, diperoleh Nilai Penimbang (NP) sebesar 0,067 dan diketahui total dari nilai persepsi per unsur yaitu masing-masing: 203, 225, 230, 237, 239, 248, 249, 236, 239, 258, 247, 235, 232, 257, 250. Sedangkan unsur yang terisi sebesar 80. (lihat tabulasi data pada lampiran)

Selanjutnya untuk memperoleh nilai efektivitas program digunakan pendekatan nilai IKM dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM = \sum \frac{\text{Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{unsur yang terisi}} \times NP$$

$$IKM = \left(\frac{203}{80} \times 0,067\right) + \left(\frac{225}{80} \times 0,067\right) + \left(\frac{230}{80} \times 0,067\right)$$

$$+ \left(\frac{237}{80} \times 0,067\right) + \left(\frac{239}{80} \times 0,067\right) + \left(\frac{248}{80} \times 0,067\right)$$

$$+ \left(\frac{249}{80} \times 0,067\right) + \left(\frac{236}{80} \times 0,067\right) + \left(\frac{239}{80} \times 0,067\right)$$

$$+ \left(\frac{258}{80} \times 0,067\right) + \left(\frac{247}{80} \times 0,067\right) + \left(\frac{235}{80} \times 0,067\right)$$

$$+ \left(\frac{232}{80} \times 0,067\right) + \left(\frac{257}{80} \times 0,067\right) + \left(\frac{250}{80} \times 0,067\right)$$

$$IKM = 0,17 + 0,19 + 0,19 + 0,20 + 0,20 + 0,20 + 0,20 + 0,20 + 0,20 +$$

$$0,22 + 0,21 + 0,20 + 0,19 + 0,22 + 0,21$$

$$IKM = 3$$

Dari hasil IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) di atas yaitu 3, jika kita lihat tabel interpretasi efektivitas di bab III maka nilai efektivitas tersebut termasuk dalam interpretasi cukup efektif.

Jadi, dari hasil analisis efektivitas program SPP di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar dapat dikatakan bahwa program tersebut cukup berhasil dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Dilihat dari dimensi perencanaan, sosialisasi dan pembinaan cukup sering dilakukan untuk anggota kelompok program SPP, proses administrasi untuk menjadi anggota pun cukup cepat dan sering tidak ada kendala. Sasaran bantuan juga tepat yaitu untuk rumah tangga kurang mampu. Sedangkan jika dilihat dari dimensi pelaksanaannya, pencairan dana untuk anggota kelompok SPP cukup cepat dan tidak ada kesulitan dalam prosesnya, pengembalian dana juga tergolong cukup tepat waktu walaupun ada beberapa anggota yang pernah terlambat dalam pengembalian dana, meskipun sebagian anggota ada yang tidak menggunakan dana 100% untuk permodalan tetapi usaha anggota cukup berkembang dengan adanya bantuan tersebut. Sedangkan dilihat dari indikator kesejahteraannya, pendapatan yang meningkat membuat mereka dapat menabung meskipun tidak sering, karena mereka harus menggunakan pendapatan untuk membayar uang sekolah anak, berobat ke puskesmas saat anggota keluarga ada yang sakit, memperbaiki rumah dan membeli fasilitas yang menurut mereka penting, dan bahkan uang tersebut dipakai untuk membayar hutang bagi mereka yang cukup sering berhutang.

Efektivitas di sini termasuk dalam efektivitas kelompok, adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi,

efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya. Pada program SPP ini semua anggota dituntut untuk profesional seperti mengembalikan dana tepat pada waktunya dan menghadiri sosialisasi dan pembinaan yang diadakan oleh UPK karena hal itu juga mempengaruhi keberhasilan program. Tujuan program tidak akan tercapai tanpa kerja sama antar individu atau anggota kelompok program SPP. Masyarakat yang menjadi anggota kelompok program SPP cukup puas terhadap program tersebut, terlihat dari hasil IKM yaitu sebesar 3 dengan interpretasi tergolong cukup efektif. Sasaran program cukup tepat yaitu untuk orang yang kurang mampu. Para karyawan Unit Pengelola Kegiatan telah melaksanakan tugas mereka untuk mengelola Program SPP PNPM-MPd dengan baik kepada anggota kelompok SPP sehingga tercapai tujuan seperti yang tercantum pada teori di bab II. Para karyawan UPK keliling untuk melakukan pertemuan langsung dengan pengelola program yang ada di desa. Mereka cukup sering turun ke lapangan demi tercapainya tujuan secara menyeluruh. Lancarnya kegiatan program ini tidak lepas dari kerjasama, pengertian, dan pengorbanan baik pelaku PNPM Instansi terkait maupun pengguna manfaat.

5. Pengujian Regresi Linear Berganda

Uji regresi linier berganda bertujuan untuk menguji pengaruh lebih dari satu *independentvariabel* (variabel bebas) terhadap *dependent variabel* (variabel terikat). Untuk mengetahui pengaruh variabel Perencanaan (X_1) dan Pelaksanaan (X_2) terhadap Kesejahteraan Ekonomi (Y) digunakan analisis regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2$$

Keterangan :

Y : Tingkat Kesejahteraan Ekonomi

x_1 : Faktor Perencanaan

x_2 : Faktor Pelaksanaan

a : Nilai konstanta

b : Koefisien regresi

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian maka dapat dilakukan perhitungan dengan menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS 13for Windows. Berikut hasil perhitungan regresi linier berganda pada tabel berikut ini:

Tabel 4.10

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,671 ^a	,450	,435	1,687

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai R sebesar 0,671 menunjukkan korelasi ganda (Perencanaan dan Pelaksanaan) dengan Kesejahteraan Ekonomi.

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,435 menunjukkan besarnya peran atau kontribusi variabel Perencanaan dan Pelaksanaan mampu menjelaskan variabel Kesejahteraan EkonomiAnggota sebesar 43,5%.

R Square sebesar 0,450 (45%) mengandung arti tingkat pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi Program SPP terhadap Kesejahteraan Ekonomi Anggota.

Tabel 4.11

ANOVA(b)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	179,170	2	89,585	31,467	,000(a)
Residual	219,218	77	2,847		
Total	398,388	79			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

H_a :Perencanaan dan Pelaksanaan secara bersama-sama (simultan)

berpengaruh terhadap Kesejahteraan Ekonomi

Nilai probabilitas F (F-hitung) dalam regresi linier berganda sebesar 0,000 < 0,05 menjelaskan bahwa hipotesis (H_a) yang diajukan diterima. Ini berarti bahwa variabel Perencanaan dan Pelaksanaan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Kesejahteraan Ekonomi Anggota.

Tabel 4.12

Coefficients(a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,775	1,514		2,493	,015
X1	,108	,101	,106	1,075	,286
X2	,649	,106	,609	6,147	,000

Berdasarkan tabel diatas dapat disusun persamaan regresi linier berganda antara variabel bebas (*independent*) dengan variabel terikat (*dependent*) dengan

memasukkan koefisien regresi linier berganda ke dalam bentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 3,775 + 0,108 X_1 + 0,649 X_2$$

a. Konstanta

Dari data tabel diatas nilai konstanta yang diperoleh adalah sebesar 3,775. Jika tidak terjadi perubahan nilai dari variabel Perencanaan (X_1) dan Pelaksanaan (X_2) maka nilai Kesejahteraan Ekonomi Anggota (Y) adalah sebesar 3,775.

b. Perencanaan (X_1)

Dari tabel data diatas koefisien regresi X_1 diperoleh sebesar 0,108 dan menunjukkan hubungan searah. Nilai 0,108 menunjukkan bahwa jika variabel Perencanaan naik sebesar 1% maka Kesejahteraan Ekonomi Anggota akan naik sebesar 10,8 % dan sebaliknya, dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Dalam hal ini variabel Perencanaan berkorelasi positif terhadap Kesejahteraan Ekonomi Anggota. Variabel X_1 ini hanya sebagai penunjang saja karena tidak berhubungan langsung dengan variabel Y , oleh karena itu koefisien regresi yang diperoleh sangat kecil dibandingkan dengan koefisien regresi yang diperoleh variabel X_2 .

c. Pelaksanaan (X_2)

Dari tabel data diatas koefisien regresi X_2 diperoleh sebesar 0,649 dan menunjukkan hubungan yang searah. Nilai 0,649 menunjukkan jika variabel Pelaksanaan naik sebesar 1%, maka Kesejahteraan Ekonomi Anggota akan naik sebesar 64,9% dan sebaliknya, dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Dalam hal ini variabel Pelaksanaan berkorelasi positif terhadap Kesejahteraan Ekonomi Anggota.

6. Pengujian Regresi Secara Simultan (Uji F)

Uji ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas (X) / (Program SPP) terhadap variabel terikat (Y) / (Kesejahteraan Ekonomi Anggota) secara bersama-sama.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0 :Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Perencanaan (X_a) dan Pelaksanaan(X_b)secara serempak terhadap Kesejahteraan Ekonomi Anggota

H_a :Ada pengaruh yang signifikan antara Perencanaan (X_a) dan Pelaksanaan (X_b)secara serempak terhadap Kesejahteraan Ekonomi Anggota

Kriteria pengujian:

Dengan *level of significany* (α) = 0,05

Degree of freedom (df) = (k-1)(n-k)

H_0 diterima dan H_a ditolak, jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau Sig. >

H_a diterima dan H_0 ditolak, jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau Sig.

Dari hasil uji F dengan SPSS 13 dapat dilihat pada tabel ANOVA. H_0 ditolak jika F_{hitung} melebihi atau lebih besar dari pada F_{tabel} . Dengan mengarah pada df, dimana:

$$df 1 = k-1$$

$$df 2 = n-k$$

$$= 5 \%$$

$$n = \text{jumlah total sampel}$$

$$k = \text{jumlah semua variabel}$$

Berdasarkan hal tersebut maka akan didapat bahwa $df 1 = 2$ dan $df 2 = 77$.

Dengan demikian F_{tabel} yang diperoleh adalah sebesar 3,115. (lihat lampiran)

Dalam penelitian ini tingkat signifikan yang ditentukan adalah 5% atau 0,05.

Berikut hasil pengujian regresi secara simultan (uji F) pada tabel:

Tabel 4.13
Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVA(b)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	179,170	2	89,585	31,467	,000(a)
Residual	219,218	77	2,847		
Total	398,388	79			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Dari tabel 4.13 diatas dapat dilihat bahwa hasil dari nilai F_{hitung} adalah sebesar 31,467 sementara F_{tabel} sebesar 3,115. Sementara nilai sig yang diperoleh adalah sebesar 0,000 dan nilai $\alpha = 5\%$ atau 0,05. Ini menunjukkan bahwa F_{hitung} lebih besar dibandingkan F_{tabel} , sebaliknya nilai sig yang diperoleh lebih kecil dibandingkan nilai α yang telah ditentukan dan menjelaskan bahwa hipotesis (H_a) yang diajukan diterima. Ini berarti terdapat pengaruh antara Program SPP secara simultan terhadap Kesejahteraan Ekonomi Anggota.

Hasil uji di atas menunjukkan bahwa Program SPP berpengaruh terhadap Kesejahteraan Ekonomi Anggota Kelompok Program SPP PNPM-MPd di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar. Mengacu pada teori di bab II, anggota kelompok program tersebut tidak dalam kategori miskin karena telah dapat memenuhi kebutuhan pokoknya atau dapat disebut sejahtera, dengan program tersebut masyarakat dituntut untuk bekerja, jadi itu sekaligus menghapus kategori pengangguran, bahkan sebagian ada yang membuka lapangan pekerjaan. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya.

Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah lainnya. Penduduk yang miskin sebagian besar berada di desa-desa, sehingga dapat dikatakan bahwa pusat kemiskinan berada di desa, jika pusat kemiskinan bisa dikurangi atau dihilangkan kemiskinannya maka akan terjadi keseimbangan dengan keadaan di kota, dengan demikian akan dapat diadakan pembangunan yang sifatnya serempak atau bersama-sama untuk waktu selanjutnya. Kurangnya sandang dan pangan, perumahan yang tidak layak, terbatasnya kepemilikan alat produksi, kurangnya kemampuan membaca dan menulis, kurangnya jaminan kesehatan, akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas serta keterpurukan lainnya di bidang ekonomi akan teratasi seiring berjalannya waktu dengan aktif pada program tersebut. Pembangunan ekonomi di perdesaan akan efektif karena program ini memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan potensinya dengan usaha yang telah dimilikinya atau yang baru dibangunnya agar dapat meningkatkan pendapatan mereka.

Pendapatan yang meningkat membuat mereka dapat menabung meskipun tidak sering, karena mereka harus menggunakan pendapatan untuk membayar uang sekolah anak, hal ini berarti menjanjikan peningkatan pendidikan anggota keluarga ke jenjang yang lebih tinggi, mereka juga menggunakan pendapatan tersebut untuk berobat ke puskesmas anggota keluarga ada yang sakit, tidak lagi hanya membeli obat di warung, tanpa diperiksa ke puskesmas. Sedangkan kondisi perumahan mereka masih banyak yang menggunakan kayu atau papan, ada

yang sering kebocoran saat hujan turun, tetapi beberapa dari mereka sudah menggunakan tembok atau rumah beton, dengan bantuan pinjaman tersebut, sebagian mereka ada yang menggunakannya untuk memperbaiki rumah, juga untuk menambah fasilitas seperti kendaraan bermotor untuk kelancaran usaha mereka, dan pada akhirnya juga dapat meningkatkan perekonomian mereka. Bantuan pinjaman dari program tersebut membuat mereka tidak perlu lagi mencari pinjaman ke mana-mana untuk permodalan atau memenuhi kebutuhan sehari-hari, meskipun terkadang sebagian masih ada yang berhutang kepada keluarga atau kerabat.

Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*). Pada teori di bab II, secara terperinci tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut, kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat, dan negara. Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil di bidang ekonomi, serta penggunaan sumber daya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak mubazir.

Mereka yang ada di perdesaan dan tergolong kurang mampu harus memperoleh keadilan yaitu diberi kesempatan yang seperti ini, memberdayakan potensi mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok dan spiritual secara mandiri untuk memperoleh *falah* (kesejahteraan dunia dan akhirat). Dengan terpenuhinya

kebutuhan dasar secara adil di bidang ekonomi, itu dapat mempermudah akses dalam melakukan ibadah dan muamalah. Pendapatan yang meningkat dapat mereka pergunakan untuk pergi ke majelis yang rutin mereka datangi setiap minggunya, karena mereka yang berada di perdesaan kebanyakan adalah orang-orang yang fanatik atau agamis. Pada teori kesejahteraan dalam konteks ekonomi Islam di bab II, di situ telah jelas ada ayat al-Qur'an dan hadits tentang kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, dan papan, ketiganya itu telah ditetapkan sebagai kebutuhan pokok yang harus terpenuhi.

Ayat al-Qur'an yang lain adalah tentang mencari rezeki atau dengan kata lain adalah bekerja, dengan program ini mereka dapat mengimplementasikan ayat tersebut, seperti yang telah diketahui, program ini menuntut pemanfaatnya untuk dapat bekerja secara mandiri agar semua kebutuhan primer dapat terpenuhi secara menyeluruh serta dimungkinkan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersier, semuanya itu tidak akan dapat diperoleh tanpa ada usaha untuk mencarinya atau mendapatkannya, demi memenuhi kebutuhan tersebut dan meningkatkan pendapatan agar tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat mereka telah diharuskan untuk bekerja atau berusaha mencari rezeki tersebut di muka bumi ini. Program ini telah membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan tersebut sehingga mereka dapat memperoleh tujuan hidup mereka yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat.

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata merupakan tujuan dari pembangunan nasional. Berbagai program dan kegiatan pembangunan telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Pembangunan ekonomi pada

umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan adalah sarana yang dicita-citakan agar dapat menyediakan lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah dan masyarakat merupakan satu kesatuan terpenting dalam pembangunan, sehingga tujuan pembangunan akan dapat tercapai, pembangunan tidak akan terwujud tanpa perencanaan dan pelaksanaan, faktor manusia memang sangat berperan bagi keberhasilan pembangunan. Suatu program akan berjalan efektif jika semua pihak duduk bersama tanpa ada kecurigaan, yang selama ini terjadi, kurang adanya koordinasi antara lembaga-lembaga tersebut. Jika ada yang mengkoordinir, maka hasilnya akan lebih efektif untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, yang perlu dilakukan adalah memberdayakan masyarakat. Ini akan lebih efektif dibandingkan hanya memberikan bantuan yang sifatnya sesaat, yang dibutuhkan adalah pemberian akses kepada masyarakat tersebut. Masyarakat harus dibantu untuk bisa mandiri memenuhi kebutuhan mereka. Masyarakat Kecamatan Tatah Makmur mengakui dan merasakan hasil pembangunan dari program yang berbasis pemberdayaan tersebut yaitu PNPM-MPd yang salah satu programnya adalah SPP (Simpan Pinjam Perempuan).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik beberapa simpulan yaitu:

1. Efektivitas Program SPP PNPM-MPd di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar interpretasinya adalah tergolong cukup efektif dengan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 3. Hal ini dapat dilihat pada tabel hasil analisis efektivitas di bab IV. PNPM Mandiri dapat membantu dalam meningkatkan tumbuhnya usaha kecil dan menengah yang ada pada masyarakat desa, yang selama ini bergantung pada pinjaman dan kekurangan modal, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat agar masyarakat dapat memperoleh kesejahteraan.
2. Terdapat pengaruh secara simultan (bersama-sama) antara variabel bebas yang meliputi variabel Perencanaan (x_1) dan Pelaksanaan (x_2) terhadap Kesejahteraan Ekonomi Anggota. Hal ini dapat dilihat pada uji F di bab IV sebelumnya yang menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} lebih besar dibandingkan F_{tabel} . PNPM Mandiri terutama Program SPP memberikan pengaruh terhadap perbaikan perekonomian masyarakat, tidak hanya kebutuhan pada sisi material tetapi kebutuhan spiritual juga telah dapat terpenuhi. Semua berharap kegiatan ini dapat terus berjalan lancar menuju masyarakat sejahtera, mandiri, dan Islami.

B. Saran

1. Untuk Kantor UPK

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, sebagai saran untuk perbaikan program, variabel perencanaan dan pelaksanaan program dipertahankan serta lebih ditingkatkan lagi karena implementasi program telah tergolong cukup efektif, agar program bisa lebih efektif bahkan sangat efektif, karena variabel perencanaan dan pelaksanaan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota program SPP sendiri, dan juga dapat meningkatkan sosialisasinya kepada masyarakat karena sebagian masyarakat belum mengerti program tersebut. Bagi pemerintah desa agar dapat meningkatkan kerjasama dan menjalin komunikasi yang baik dengan tim pengelola PNPM Mandiri agar dana yang telah dicairkan pemerintah tidak salah sasaran. Bagi masyarakat agar dapat memanfaatkan program PNPM Mandiri ini sebaik mungkin terutama SPP.

2. Untuk Penelitian yang Akan Datang

Bagi para peneliti berikutnya melihat masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini sekiranya dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai efektivitas program SPP terhadap peningkatan kesejahteraan anggota, khususnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai tatanan konsep ekonomi Islam. Selain itu dapat pula dengan mengambil objek yang berbeda maupun dengan meneliti variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi.